

Peran Kepercayaan Lokal dalam Mendukung Konservasi Edelweis dan Pengelolaan Kawasan Lindung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Indonesia

Muhammad Gilang Firdaus¹, A. Zahid².

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

Firdausgalang14@gmail.com, azahid19@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the Tengger belief system as a form of social-ecological governance in the conservation of Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS). The research object focuses on Wonokitri Village, examining the articulation between myth, customary authority, edelweiss conservation, and tourism pressure. Employing an interpretive case study approach, data were collected through field observation, semi-structured interviews with six key informants, document analysis, and academic literature review, framed within social-ecological systems (SES), traditional ecological knowledge (TEK), and political ecology. The findings demonstrate that Tengger cosmology and the sacredness of Javanese edelweiss (tanalayu) constitute an autonomous normative architecture that regulates community ecological behavior through moral and spiritual legitimacy. Conservation in TNBTS is identified as a negotiation arena among three value regimes: state governance, indigenous cosmological governance, and the tourism economy. The study concludes by repositioning myth from a supplementary element to the center of sustainability analysis, challenging mainstream conservation paradigms that overlook the ontological and political-ecological dimensions of protected area management.

Keyword: Bromo Tengger Semeru National Park; conservation; myth; political ecology; social ecological governance; traditional ecological knowledge.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis sistem kepercayaan Tengger sebagai tata kelola sosial-ekologis dalam konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Objek penelitian berfokus pada Desa Wonokitri dengan mengkaji artikulasi antara mitos, otoritas adat, konservasi edelweis, dan tekanan pariwisata. Menggunakan pendekatan studi kasus interpretif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi terstruktur dengan enam informan kunci, analisis dokumen, dan tinjauan literatur akademik, yang dikaji dalam kerangka social ecological systems (SES), traditional ecological knowledge (TEK), dan ekologi politik. Temuan menunjukkan bahwa kosmologi Tengger serta kesakralan edelweis Jawa (tanalayu) membentuk arsitektur normatif otonom yang mengatur perilaku ekologis masyarakat melalui legitimasi moral dan spiritual. Konservasi di TNBTS terbukti sebagai arena negosiasi antara tiga rezim nilai, yaitu tata kelola negara, tata kelola kosmologis adat, dan ekonomi pariwisata. Studi ini menyimpulkan dengan mereposisi mitos dari unsur tambahan menjadi pusat analisis keberlanjutan, sekaligus menantang paradigma konservasi arus utama yang mengabaikan dimensi ontologis dan politik-ekologis dalam pengelolaan kawasan lindung.

Kata Kunci: ekologi politik; konservasi; mitos; pengetahuan ekologi tradisional; Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; tata kelola sosial ekologis.

PENDAHULUAN

Laporan global Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services menyebutkan bahwa sekitar satu juta spesies flora dan fauna kini terancam punah akibat aktivitas manusia, menjadikan tata kelola keanekaragaman hayati global berada pada titik kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah

peradaban modern (IPBES, 2019). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa berbagai instrumen negara formal yang telah dirancang selama puluhan tahun termasuk kerangka Convention on Biological Diversity (CBD) dan target Aichi gagal membalikkan tren degradasi lingkungan yang terus berlangsung (Biermann et al., 2009). Meskipun luas kawasan lindung global terus meningkat, bukti

empiris menunjukkan bahwa pendekatan konservasi yang mengabaikan dinamika sosial sering kali berujung pada kegagalan integritas ekosistem dan marjinalisasi komunitas lokal (Naughton-Treves et al., 2005; Oldekop et al., 2015). Sosiologi lingkungan menekankan perlunya pergeseran paradigma menuju kerangka sistem sosial-ekologis yang mengakui bahwa kelestarian alam sangat bergantung pada bagaimana masyarakat lokal memaknai, mengorganisir, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka (Folke, 2004; Ostrom, 2009).

Konteks ini menjadi sangat krusial di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia yang berfungsi sekaligus sebagai kawasan lindung, kawasan cagar biosfer, dan destinasi wisata. Daya saing ekowisata berkelanjutan TNBTS paling banyak dipengaruhi secara negatif oleh kebijakan pariwisata dan kondisi lingkungan (Wibowo et al., 2021). Di tengah tantangan modernitas, masyarakat Tengger yang merupakan komunitas Hindu Jawa asli tetap mempertahankan hubungan kosmologis yang mendalam dengan alam melalui tiga relasi fundamental *prahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Ketiga konsep tersebut mencakup hubungan spiritual manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antar sesama manusia, dan hubungan timbal balik dengan lingkungan alam yang menjadi landasan filosofis bagi praktik konservasi mereka, terejawantahkan dalam siklus ritual dan praktik budaya seperti Tamping, serta diperkuat oleh otoritas adat yang telah teruji secara historis (Sukmawan & Alifah, 2024).

Tata kelola sosial-ekologis di TNBTS tidak hanya bersandar pada aturan birokratis, tetapi secara substantif digerakkan oleh sistem kepercayaan lokal yang mengakar kuat. Kepercayaan terhadap hukum adat dan konsep moralitas lingkungan berperan signifikan dalam membentuk perilaku konservasi masyarakat, sering kali menjangkau dimensi

kepatuhan yang tidak dapat dicapai oleh hukum formal nasional semata (Cinner & Aswani, 2007; Techera, 2010). Hal ini disebabkan oleh kepatuhan sosial yang didorong oleh komitmen spiritual dan nilai-nilai budaya seperti *setuhu* dan *welas asih pepitu* yang menciptakan mekanisme kontrol internal terhadap penggunaan sumber daya alam (Putri et al., 2022; Yunas et al., 2024). Dalam kerangka transformasi sosial, keberhasilan perubahan struktural sangat ditentukan oleh kompetensi aktor lokal dan kemampuan komunitas dalam menguji cobakan model-model baru pengelolaan sumber daya dalam skala *niche* sebelum meluas ke tataran yang lebih luas (Geels, 2002). Kajian komprehensif terhadap 662 studi empiris dari 102 negara yang mencakup inisiatif konservasi selama lima dekade menunjukkan bahwa luaran ekologi dan sosial yang positif secara konsisten berkaitan kuat dengan tingginya tingkat pengaruh masyarakat adat dan komunitas lokal beserta institusi mereka dalam tata kelola konservasi (Dawson et al., 2024).

Dalam struktur sosial Tengger, mitos berperan sebagai sistem makna yang mengkodifikasikan etika lingkungan ke dalam norma-norma praktis kehidupan sehari-hari. Simbolisme ekologis dan spiritual ini termanifestasi secara nyata pada bunga Edelweis Jawa (*Anaphalis javanica*), yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai bunga abadi dan disebut *tanalayu* dalam tradisi lisan masyarakat Tengger. Secara ekologis, edelweis merupakan spesies pionir yang mampu tumbuh di tanah vulkanik muda yang tandus, berperan krusial dalam menstabilkan ekosistem dan memulihkan vegetasi pascaerupsi di kawasan TNBTS (Hernawan et al., 2020; Wahyudi, 2011; Susanto et al., 2024). Namun bagi warga Tengger, signifikansi tanaman ini melampaui fungsi botanis: edelweis adalah entitas sakral, sehingga kepunahannya dipandang bukan hanya sebagai kehilangan ekologis tetapi juga sebagai ancaman terhadap kelangsungan

identitas sosial (Ade et al., 2019; Susanto et al., 2024). Kajian pengetahuan ekologi tradisional (*Traditional Ecological Knowledge/TEK*) yang melibatkan 641 responden dari tujuh desa Tengger menemukan bahwa 84,76% masyarakat mempersepsikan edelweis sebagai spesies yang langka atau sangat langka, dan hanya 32,92% yang melaporkan pernah menyaksikan tanaman ini dalam dua tahun terakhir (Susanto et al., 2024). Kondisi ini justru memperkuat komitmen spiritual komunitas terhadap upaya konservasi berbasis adat, sebagaimana tercermin dari terbentuknya kelompok tani Hulun Hyang di Desa Wonokitri sebagai inisiatif konservasi *ex-situ* yang lahir dari kesadaran akan ancaman kepunahan spesies sakral ini (Ade et al., 2019).

Eksistensi tata kelola sosial-ekologis berbasis kepercayaan ini menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang otonom dan tangguh di tingkat komunitas lokal. Praktik ini termanifestasi dalam pengaturan spasial melalui keberadaan situs-situs pemujaan (*Sanggar Pamujan*) dan penerapan tempat larangan yang secara *de facto* berfungsi sebagai zona inti konservasi, meskipun berada di luar pengawasan formal petugas kehutanan (Batoro et al., 2017). Mekanisme ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar pelengkap, melainkan arsitektur utama dalam menjaga integritas ekosistem kawasan lindung (Verschuuren et al., 2010; Yunas et al., 2024). Sinergi antara otoritas Dukun Pandita sebagai pemimpin adat sekaligus pemimpin ritual, yang menjadi figur otoritas tertinggi dalam struktur sosial-spiritual masyarakat, membuat tata kelola berbasis kepercayaan lokal berpotensi memiliki resiliensi yang kuat terhadap tekanan komersialisasi pariwisata (Yunas et al., 2023; Hidayat, 2019).

Namun, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam literatur konservasi di Indonesia, khususnya terkait kosmologi dataran tinggi vulkanik di Jawa. Studi TEK di wilayah Jawa memang ada misalnya pada masyarakat Baduy, Kasepuhan Ciptagelar,

atau Dieng tetapi sebagian besar masih terfokus pada komunitas hutan di luar Jawa yang berkonflik dengan industri ekstraktif (Elmhirst et al., 2015; Li, 2007). Analisis sistematis mengenai bagaimana kosmologi dataran tinggi vulkanik di Jawa berfungsi sebagai arsitektur tata kelola konservasi yang fungsional masih sangat terbatas dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Susanto et al., 2024; Wiswayana et al., 2024). Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Tengger membentuk bentuk-bentuk tata kelola sosial-ekologis yang nyata dalam konservasi kawasan TNBTS. Artikel ini secara khusus menjawab dua pertanyaan penelitian utama: (1) bagaimana sistem kepercayaan Tengger membentuk praktik tata kelola konservasi secara fungsional dan (2) seberapa efektif tata kelola berbasis kepercayaan tersebut dalam menghadapi tekanan komodifikasi pariwisata. Dengan mengintegrasikan kerangka sistem sosial-ekologis dan analisis TEK, penelitian ini diupayakan untuk menyediakan model baru bagi kebijakan konservasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan lindung pegunungan dunia (Hefner, 1985; Verschuuren et al., 2010).

KAJIAN TEORI

Perdebatan tentang konservasi kawasan lindung selama ini terlalu sering bergerak di dalam dua bingkai yang sama-sama terbatas. Di satu sisi, konservasi dibayangkan sebagai urusan administrasi, pengawasan negara, dan desain kebijakan yang tepat. Di sisi lain, ketika masyarakat lokal mulai diakui, mereka masih kerap ditempatkan sekadar sebagai pelengkap partisipatif bagi agenda yang kerangka normatifnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh negara, lembaga pembangunan, atau pasar wisata. Kedua bingkai tersebut membantu menjelaskan sebagian persoalan, tetapi keduanya kerap gagal menangkap kenyataan bahwa relasi manusia dengan kawasan lindung tidak selalu dimediasi pertama-tama oleh regulasi formal atau

kalkulasi ekonomi. Dalam banyak kasus, termasuk di TNBTS, hubungan itu justru dibentuk dari dalam oleh kosmologi, ritus, tabu, dan sistem otoritas lokal yang memberi makna sekaligus batas pada tindakan manusia terhadap alam.

Kerangka *Social-Ecological Systems* (SES) yang dikembangkan Elinor Ostrom (2009) tetap penting sebagai titik berangkat karena menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak dapat dijelaskan hanya oleh kualitas biofisik lingkungan, tetapi oleh interaksi antara aktor, institusi, sistem sumber daya, dan arena aksi. Dalam logika SES, keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat ditentukan oleh kecocokan antara aturan, konteks lokal, dan kapasitas kelembagaan komunitas. Carl Folke (2004) kemudian memperluas pembacaan ini dengan menegaskan bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian integral dari resiliensi sosial-ekologis. Akan tetapi, jika digunakan secara apa adanya, SES dan TEK tetap berisiko memperlakukan kepercayaan lokal sebagai variabel budaya di dalam sistem yang lebih besar, bukan sebagai sumber normativitas yang secara aktif menghasilkan tata kelola.

Keterbatasan itu penting ditegaskan karena bukti mutakhir menunjukkan bahwa hasil konservasi yang paling positif justru berhubungan kuat dengan besarnya pengaruh masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengatur ekosistem mereka sendiri (Dawson et al., 2024). Masalahnya, pengaruh tersebut tidak selalu bekerja melalui mekanisme formal yang mudah dibaca oleh bahasa kebijakan. Di banyak tempat, kepatuhan ekologis muncul dari bentuk-bentuk otoritas yang bersemayam pada memori leluhur, kewajiban ritual, struktur moral komunitas, dan rasa takut maupun hormat terhadap konsekuensi kosmologis pelanggaran. Dengan kata lain, keberhasilan konservasi tidak hanya bertumpu pada desain institusi, tetapi juga pada cara suatu komunitas mengorganisasi dunia moral

tempat alam dipahami, dibatasi, dan diperlakukan.

Di masyarakat Tengger, dimensi tersebut hadir secara jelas. Relasi *prahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* tidak sekadar menyediakan kosakata etis tentang harmoni, melainkan membentuk kerangka ontologis tentang bagaimana manusia mesti hidup bersama Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dari sini TNBTS tidak tampil sebagai lanskap biofisik yang netral, melainkan sebagai ruang yang telah dipadati kewajiban moral, penandaan sakral, dan bentuk-bentuk otoritas yang hidup. Karena itu, pembacaan terhadap konservasi di Tengger tidak cukup jika hanya menanyakan seberapa jauh masyarakat lokal mendukung kebijakan negara yang lebih penting adalah melihat bagaimana dunia sosial-ekologis setempat telah lama diatur melalui logika yang berbeda dari rasionalitas birokratik.

Argumen tersebut menjadi semakin kuat ketika kepercayaan lokal dibaca bukan sebagai warisan budaya pasif, tetapi sebagai rezim pengaturan yang operasional. Hukum adat, konsep moralitas lingkungan, nilai *setuhu*, dan *welas asih pepitu* bekerja sebagai mekanisme internalisasi yang membentuk kepatuhan dari dalam, bukan semata melalui ancaman sanksi eksternal (Putri et al., 2022; Yunas et al., 2024). Dalam pengertian ini, yang bekerja di Tengger bukan hanya “partisipasi masyarakat”, melainkan apa yang dapat disebut sebagai tata kelola kosmologis: suatu bentuk pengaturan sosial-ekologis yang memperoleh legitimasi dari tatanan spiritual dan norma kosmologis komunitas. Konsep ini memperluas gagasan *belief-grounded governance* (Techera, 2010; Cinner & Aswani, 2007), sekaligus memungkinkan analisis bergerak melampaui dikotomi konservasi berbasis negara versus konservasi berbasis komunitas.

Salah satu konsekuensi paling penting dari tata kelola kosmologis adalah kemampuannya membentuk ruang. Mitos dan tabu tidak hanya menceritakan masa lalu atau memelihara

identitas, tetapi juga menghasilkan batas-batas teritorial dan temporal yang konkret. Studi klasik tentang tabu sosial menunjukkan bahwa larangan adat dapat berfungsi sebagai “sistem tak kasat mata” (*invisible systems*) dalam pengelolaan sumber daya menciptakan zona perlindungan *de facto*, membatasi akses terhadap spesies rentan, dan menata waktu pemanfaatan tanpa perlu aparat pengawasan formal (Colding & Folke, 2001). Di TNBTS, keberadaan *Sanggar Pamujan* dan larangan tempat tertentu dapat dibaca dalam kerangka ini. Nilai kesakralan kawasan menciptakan penghalang psikologis, moral, dan sosial yang kuat terhadap eksploitasi, sehingga ruang sakral sekaligus berfungsi sebagai ruang lindung (Batoro et al., 2017; Verschuuren et al., 2010).

Di titik ini, mitos perlu dipahami sebagai infrastruktur normatif, afektif, dan teritorial. Ia bersifat normatif karena menyediakan justifikasi moral tentang mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ia bersifat afektif karena mengorganisasi rasa hormat, takut, malu, dan keterikatan yang membuat kepatuhan tidak bergantung sepenuhnya pada pemaksaan dari luar. Ia bersifat teritorial karena menandai lanskap, membedakan ruang biasa dari ruang sakral, dan dengan demikian memproduksi zonasi ekologis *de facto*. Pembacaan semacam ini lebih memadai untuk menjelaskan mengapa konservasi di Tengger tidak dapat direduksi menjadi perilaku pro-lingkungan individual, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari reproduksi sosial suatu dunia kosmologis yang menautkan manusia, leluhur, spesies, dan kawasan lindung dalam satu tatanan relasional (Achmadi et al., 2019; Hefner, 1985).

Kasus edelweis Jawa memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana spesies dapat menjadi simpul pertemuan antara ekologi dan kosmologi. Secara biofisik, *Anaphalis javanica* berperan penting dalam ekosistem vulkanik karena merupakan spesies pionir yang membantu stabilisasi tanah dan pemulihan vegetasi pascaerupsi (Hernawan et

al., 2020; Wahyudi, 2011; Susanto et al., 2024). Namun bagi masyarakat Tengger, edelweis tidak berhenti sebagai spesies ekologis ia adalah *tanalayu*, bunga sakral. Ketika spesies ini mengalami kelangkaan, ancaman yang muncul bukan hanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga ancaman terhadap identitas kolektif. Di sinilah dorongan konservasi memperoleh intensitas yang jauh melampaui kalkulasi utilitarian, karena melindungi spesies berarti sekaligus melindungi dunia sosial dan spiritual yang menopang komunitas (Ade et al., 2019; Susanto et al., 2024).

Pembacaan tersebut juga menjelaskan mengapa TEK penting, tetapi tidak cukup. Pengetahuan ekologis tradisional memberi akses untuk memahami bagaimana masyarakat Tengger memonitor perubahan status spesies, membaca dinamika musim, dan menafsirkan pemulihan lanskap pascaerupsi melalui akumulasi pengalaman lintas generasi (Souther et al., 2023). Akan tetapi, TEK hanya menjadi analitis secara penuh ketika diletakkan bersama struktur nilai yang menghidupinya. Pendekatan *Multiple Evidence Base* (Tengö et al., 2014) membantu karena menolak hierarki epistemologis yang menempatkan sains modern sebagai satu-satunya sumber validitas, tetapi artikel ini melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa pengetahuan dan kepercayaan di Tengger bekerja secara ko-konstitutif pengetahuan ekologis memperoleh daya ikat justru karena tertambat pada ritus, moralitas, dan kewajiban kosmologis.

Dari sini tampak bahwa persoalan konservasi di TNBTS sesungguhnya adalah persoalan kontestasi rezim nilai. Tekanan pariwisata tidak hanya membawa peningkatan kunjungan, komersialisasi ruang, atau beban ekologis tambahan, tetapi juga memperkenalkan rasionalitas lain terhadap kawasan: visibilitas, aksesibilitas, daya jual, dan konsumsi pengalaman. Dalam logika itu, lanskap sakral berisiko diterjemahkan menjadi atraksi, ritual menjadi tontonan, dan spesies

tertentu menjadi objek komodifikasi simbolik maupun ekonomi (Yunas et al., 2023; Wibowo et al., 2021). Karena itu, ancaman terhadap tata kelola lokal tidak bekerja semata-mata melalui perusakan langsung, tetapi melalui reorganisasi makna dan otoritas. Dalam bahasa politik ekologi, yang dipertarungkan bukan hanya sumber daya, melainkan juga cara sah untuk mendefinisikan kawasan, memaknai alam, dan menentukan siapa yang berwenang mengatur relasi manusia-lingkungan di dalamnya (Li, 2007).

Atas dasar itu, kajian teori ini tidak menempatkan mitos dan kepercayaan lokal sebagai unsur tambahan dalam konservasi, melainkan sebagai pusat dari tata kelola sosial-ekologis masyarakat Tengger. Mitos, ritus, larangan adat, dan otoritas Dukun Pandita bukan sekadar ekspresi kebudayaan, tetapi bekerja sebagai perangkat normatif yang mengatur bagaimana kawasan dipersepsi, digunakan, dan dijaga (Hidayat, 2019; Yunas et al., 2024). Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini bukan sekadar menunjukkan bahwa kepercayaan lokal membantu konservasi di TNBTS, melainkan bahwa konservasi di Tengger sejak awal merupakan persoalan ontologis dan politik-ekologis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus interpretatif untuk membaca secara interpretatif potensi, mekanisme, dan batas tata kelola berbasis kepercayaan lokal. Studi kasus digunakan bukan sebagai dasar generalisasi statistik, tetapi sebagai cara untuk menelusuri bagaimana makna, otoritas, ruang sakral, spesies, dan praktik konservasi saling diartikulasikan dalam satu konfigurasi sosial-ekologis tertentu.

Peneliti mengacu pada literatur akademik tentang masyarakat Tengger, edelweis Jawa, pengetahuan ekologis tradisional, situs sakral, tata kelola konservasi, dan politik ekologi pariwisata. Literatur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari medan data karena penelitian ini berangkat dari pertanyaan

konseptual tentang bagaimana mitos dan kepercayaan lokal membentuk tata kelola sosial-ekologis. Laporan konservasi, arsip publik, serta pemberitaan tentang TNBTS dibaca sebagai wacana yang memperlihatkan bagaimana negara dan pariwisata mendefinisikan kawasan, spesies, dan partisipasi masyarakat.

Data lapangan dikumpulkan selama dua hari melalui observasi lapangan terarah, dokumentasi lokasi, dan wawancara semi-terstruktur. Fokus lokasi ditempatkan pada Desa Wonokitri karena desa ini relevan dengan isu edelweis, praktik adat, otoritas lokal, dan tata kelola berbasis kepercayaan masyarakat Tengger. Ngadisari dan kawasan wisata Bromo tidak diposisikan sebagai lokasi kasus utama, melainkan sebagai konteks pendukung untuk memahami tekanan pariwisata terhadap lanskap Tengger.

Karena durasi lapangan terbatas, penelitian ini tidak mengklaim melakukan etnografi jangka panjang ataupun observasi langsung terhadap seluruh siklus ritus adat. Ritus seperti Kasada, Karo, atau praktik seremonial lain dibaca melalui narasi informan, dokumentasi lokal, arsip publik, dan studi terdahulu. Observasi lapangan digunakan untuk mencatat penanda ruang, relasi antara aktivitas wisata dan kawasan adat, penggunaan simbol budaya, serta cara aktor lokal menjelaskan hubungan antara edelweis, ruang sakral, dan kewajiban sosial. Analisis dilakukan secara tematik-interpretatif dengan menelusuri kategori seperti mitos dan kosmologi, otoritas Dukun Pandita, ruang sakral, edelweis sebagai spesies ekologis-kosmologis, norma kepatuhan, serta tekanan pariwisata.

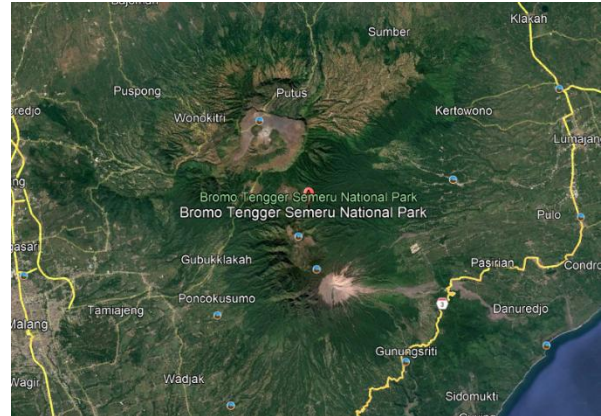
Untuk menjaga kehati-hatian analitis, hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur dibandingkan melalui triangulasi sumber dan metode. Perbedaan antara narasi tokoh adat, warga, pelaku wisata, dan dokumen konservasi tidak diperlakukan sebagai gangguan data, melainkan sebagai bagian dari medan negosiasi yang

memperlihatkan bagaimana adat, konservasi formal, dan pariwisata saling memengaruhi. Karena itu, keterbatasan penelitian dua hari tidak disembunyikan, tetapi menjadi dasar pembatasan klaim. Artikel ini tidak menyatakan bahwa tata kelola lokal selalu harmonis atau sepenuhnya efektif, melainkan menunjukkan bagaimana mitos dan kepercayaan lokal dapat dibaca sebagai medium tempat konservasi, otoritas adat, pengetahuan lokal, dan tekanan pariwisata dinegosiasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi TNBTS tidak memadai apabila dibaca hanya sebagai persoalan manajemen kawasan, perlindungan spesies, atau pengendalian wisata. Pembacaan teknokratis memang memudahkan masalah diterjemahkan ke dalam zonasi, pengawasan, larangan, dan program rehabilitasi. Namun, kerangka tersebut cenderung mengaburkan fakta bahwa kawasan Bromo Tengger Semeru juga merupakan lanskap kosmologis yang dipahami melalui relasi antara manusia, leluhur, gunung, ritus, dan makhluk non-manusia. Dengan kata lain, konservasi di Tengger tidak hanya menyangkut bagaimana alam dikelola, tetapi juga dunia macam apa yang dianggap sedang dijaga.

Kerangka taman nasional menempatkan kawasan sebagai objek administratif negara ruang yang dapat dipetakan, diklasifikasi, diawasi, dan diatur melalui perangkat formal. Sementara itu, bagi masyarakat Tengger, kawasan yang sama hadir sebagai ruang hidup yang memuat kewajiban ritual, larangan adat, dan hubungan moral dengan lanskap vulkanik. Ketegangan muncul ketika satu cara membaca kawasan berusaha menjadi satu-satunya bahasa yang sah. Jika alam hanya didefinisikan melalui kategori legal-konservasionis, maka makna kosmologis yang menopang kepatuhan lokal berisiko dianggap sekadar latar budaya, bukan bagian dari tata kelola itu sendiri.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian: Desa Wonokitri dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Citra satelit dari Google Earth Pro. © 2026 Google LLC.

Karena itu, isu utama bukanlah apakah pengetahuan lokal dapat “membantu” negara mengelola taman nasional. Rumusan tersebut



Gambar 2. Sanggar Pamujan dan Gunung Batok di kawasan Gunung Bromo, TNBTS, 3 Mei 2026. Sumber: penulis.

masih menempatkan adat sebagai instrumen tambahan bagi kebijakan formal. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana konservasi formal bertemu dengan tata kelola kosmologis yang lebih dahulu menghubungkan ruang, spesies, otoritas, dan kepatuhan. Dengan cara baca ini, masyarakat Tengger tidak dilihat sebagai objek kebijakan konservasi, tetapi sebagai aktor yang membawa rezim makna dan otoritas sendiri dalam mendefinisikan alam, pelestarian, dan keberlanjutan.

Dengan memusatkan perhatian pada Wonokitri, penelitian ini tidak bermaksud menjadikan satu desa sebagai representasi total seluruh masyarakat Tengger. Wonokitri diperlakukan sebagai titik artikulasi, yakni lokasi tempat isu edelweis, praktik adat, otoritas lokal, dan hubungan dengan kawasan konservasi dapat dibaca secara konkret. Pilihan ini penting karena penelitian lapangan dua hari tidak memungkinkan etnografi komprehensif atas seluruh desa Tengger.

Dalam konteks ini, pengetahuan ekologis tradisional tidak dipahami sebagai kumpulan informasi lokal tentang spesies, musim, atau lanskap yang berdiri sendiri. Pengetahuan semacam itu hidup di dalam sistem nilai yang memberi makna pada tindakan. Larangan mengambil tumbuhan tertentu, penghormatan terhadap ruang tertentu, atau kepatuhan terhadap otoritas adat tidak dapat dipisahkan dari tatanan kosmologis yang menjelaskan mengapa tindakan tertentu dianggap pantas, berbahaya, atau wajib dihindari. Dengan demikian, TEK di Tengger perlu dibaca bukan hanya sebagai pengetahuan tentang alam, tetapi sebagai pengetahuan yang dilegitimasi oleh hubungan sosial, spiritual, dan ekologis sekaligus.

Posisi Dukun Pandita memperlihatkan hubungan tersebut secara jelas. Otoritas Dukun Pandita tidak bekerja seperti aparat formal negara yang mengandalkan sanksi administratif, tetapi melalui legitimasi ritual dan moral. Otoritas ini memungkinkan norma ekologis diterjemahkan ke dalam bahasa kewajiban sosial dan spiritual. Karena itu, ketika Dukun Pandita, warga, kelompok konservasi, dan perangkat desa berbicara tentang kawasan, mereka tidak hanya membicarakan ruang fisik, tetapi juga relasi antara tata nilai, ritus, dan keberlanjutan hidup bersama. Di titik inilah mitos berfungsi sebagai perangkat tata kelola, bukan sekadar cerita asal-usul atau simbol identitas (Hidayat, 2019; Yunas et al., 2023).

Edelweis dan Konservasi sebagai Relasi Kosmologis

Edelweis menempati posisi penting karena mempertemukan status ekologis, nilai simbolik, dan kepentingan konservasi. Dalam bahasa konservasi formal, edelweis dapat dibicarakan sebagai spesies pegunungan yang memerlukan perlindungan habitat dan pemantauan populasi. Dalam bahasa adat dan ritual, edelweis hadir dalam hubungan yang lebih luas dengan praktik penghormatan, persembahan, dan makna lanskap. Perbedaan ini tidak berarti bahwa satu bahasa lebih benar daripada yang lain; yang penting adalah melihat bagaimana keduanya bertemu dan kadang saling menegangkan dalam praktik konservasi di kawasan TNBTS.

Ketika edelweis direduksi menjadi objek wisata, dekorasi, atau komoditas simbolik, relasi kosmologis yang melekat padanya dapat melemah. Namun, ketika edelweis hanya dibaca sebagai objek perlindungan negara, makna sosial dan ritual yang selama ini ikut membatasi penggunaannya juga dapat terpinggirkan. Karena itu, konservasi edelweis di Tengger tidak cukup dipahami sebagai perlindungan spesies, tetapi perlu dibaca sebagai perlindungan terhadap relasi yang menjadikan spesies tersebut bermakna. Relasi itu meliputi ruang tumbuh, larangan pengambilan, pengetahuan lokal, otoritas adat yang mengatur penggunaan serta penghormatannya (Ade et al., 2019; Susanto et al., 2024).

Dalam kerangka ini, situs sakral dan tabu sosial tidak dipahami sebagai sisa kepercayaan tradisional yang berada di luar rasionalitas konservasi. Sebaliknya, keduanya dapat berfungsi sebagai mekanisme pembatasan akses, pengaturan perilaku, dan perlindungan ekologis yang bekerja melalui legitimasi moral. Efektivitasnya tidak selalu dapat diukur melalui indikator manajerial jangka pendek,

tetapi dapat dibaca dari kemampuannya membentuk kepatuhan, rasa takut melanggar, dan kesadaran bahwa ruang tertentu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai sumber daya (Colding & Folke, 2001; Verschuuren et al., 2010).

Pariwisata Bromo dan Komodifikasi Lanskap Sakral, Ngadisari dan kawasan wisata Bromo digunakan sebagai konteks pendukung untuk memahami bagaimana pariwisata mengubah cara lanskap Tengger dibaca. Pariwisata tidak hanya menambah jumlah pengunjung atau memperbesar tekanan ekologis, tetapi juga membawa bahasa nilai yang berbeda lanskap menjadi atraksi, ritus menjadi tontonan, dan spesies simbolik menjadi bagian dari pengalaman wisata. Dalam kondisi ini, konflik konservasi tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat lokal, tetapi juga antara cara-cara berbeda dalam mendefinisikan nilai kawasan.

Tekanan pariwisata bekerja secara halus karena sering hadir sebagai peluang ekonomi, bukan sebagai ancaman langsung. Namun, justru di situlah masalahnya. Ketika lanskap sakral diterjemahkan ke dalam bahasa pasar, hubungan kosmologis yang sebelumnya membatasi tindakan dapat berubah menjadi sumber daya yang bisa dikonsumsi. Ritual, pakaian adat, ruang sakral, dan simbol ekologis dapat dipertunjukkan untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Proses ini tidak selalu menghancurkan adat secara langsung, tetapi dapat menggeser otoritas yang menentukan apa yang boleh diperlihatkan, dijual, dilintasi, atau disentuh (Yunas et al., 2023; Wibowo et al., 2021).

Dengan demikian, pariwisata tidak hanya perlu dipahami sebagai faktor eksternal yang memberi tekanan pada ekologi, tetapi sebagai rezim pembungkaman. Pariwisata menentukan apa yang tampak menarik, apa yang dianggap bernilai, dan apa yang dapat diperdagangkan. Pembungkaman tersebut dapat menutupi dimensi yang lebih dalam bahwa kawasan Bromo-Tengger-Semeru bukan hanya lanskap visual untuk dikunjungi, melainkan ruang

relasional tempat keberlanjutan ekologis, otoritas adat, dan kewajiban kosmologis dipertaruhkan.

Mitos sebagai Arsitektur Tata Kelola Sosial-Ekologis

Mitos tidak dapat ditempatkan sebagai variabel budaya tambahan dalam konservasi. Mitos bekerja sebagai arsitektur tata kelola ia menghubungkan ruang dengan nilai, spesies dengan kewajiban, otoritas dengan legitimasi, dan tindakan ekologis dengan konsekuensi moral. Dengan demikian, mitos bukan sekadar menjelaskan mengapa masyarakat mempercayai sesuatu, tetapi mengatur bagaimana kawasan dipahami, siapa yang boleh berbicara atas nama adat, dan tindakan apa yang dianggap melanggar tatanan sosial-ekologis (Colding & Folke, 2001; Achmadi et al., 2019).

Reposisi ini juga menghindari jebakan integrasi pengetahuan lokal yang terlalu mudah. Dalam banyak kebijakan konservasi, pengetahuan lokal sering diterima sejauh dapat diterjemahkan menjadi data, praktik, atau instrumen yang berguna bagi negara. Akan tetapi, ketika pengetahuan lokal dilepaskan dari kosmologi yang memberi legitimasi padanya, yang tersisa hanyalah teknik tanpa dunia makna. Dalam konteks Tengger, larangan, ritus, dan penghormatan terhadap ruang sakral tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalam bahasa kebijakan tanpa mengubah struktur otoritas dan relasi yang menopangnya (Li, 2007; Hefner, 1985).

Oleh karena itu, tata kelola sosial-ekologis di Tengger perlu dipahami sebagai medan negosiasi antara sedikitnya tiga rezim: konservasi formal negara, tata kelola kosmologis masyarakat, dan ekonomi pariwisata. Ketiganya tidak selalu bertentangan secara langsung, tetapi masing-masing membawa bahasa nilai dan bentuk otoritas yang berbeda. Negara berbicara melalui regulasi, zonasi, dan

perlindungan spesies; masyarakat adat berbicara melalui mitos, ritus, dan otoritas moral; sedangkan pariwisata berbicara melalui pengalaman, visualitas, dan konsumsi. Analisis menjadi penting justru karena ketiganya saling bertemu dalam ruang yang sama.

Dengan demikian, konservasi TNBTS tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya dikaji sebagai keberhasilan atau kegagalan pengelolaan kawasan. Ia harus dibaca sebagai persoalan ontologis dan politik-ekologis persoalan tentang dunia mana yang dipertahankan, pengetahuan siapa yang dianggap sah, dan bentuk keberlanjutan apa yang diprioritaskan. Kontribusi artikel ini adalah menunjukkan bahwa konservasi di Tengger sejak awal berlangsung melalui negosiasi antara alam sebagai objek kebijakan, alam sebagai ruang sakral, dan alam sebagai komoditas wisata.

KESIMPULAN

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konservasi di kawasan Bromo-Tengger-Semeru tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis manajemen taman nasional, perlindungan edelweis, atau pengendalian dampak wisata. Bahasa konservasi formal dapat menutupi keberadaan tata kelola kosmologis yang hidup dalam masyarakat Tengger apabila kawasan hanya dibaca sebagai objek administratif, ekologis, atau ekonomis. Yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian ekosistem, tetapi juga keberlanjutan relasi antara manusia, ruang sakral, spesies, leluhur, otoritas adat, dan negara.

Dengan memusatkan perhatian pada Wonokitri dan menempatkan Ngadisari sebagai konteks pendukung tekanan pariwisata, artikel ini memperlihatkan bahwa mitos dan kepercayaan lokal bekerja sebagai arsitektur normatif tata kelola sosial-ekologis. Mitos mengatur cara kawasan dipahami,

membentuk etika penggunaan, menandai ruang yang dilindungi, memberi legitimasi pada otoritas Dukun Pandita, dan menghubungkan konservasi edelweis dengan tatanan moral yang lebih luas. Karena itu, mitos tidak berada di luar konservasi, tetapi menjadi medium tempat konservasi didefinisikan, dilegitimasi, dan dinegosiasikan.

Kontribusi konseptual artikel ini terletak pada reposisi mitos dari unsur budaya tambahan menjadi pusat analisis tata kelola sosial-ekologis. Dengan reposisi tersebut, konservasi Tengger dapat dibaca sebagai arena tempat negara, adat, spesies, ruang sakral, dan pariwisata saling membentuk sekaligus saling membatasi. Implikasinya, kebijakan konservasi yang peka terhadap konteks Tengger tidak cukup hanya memasukkan masyarakat lokal sebagai peserta program, tetapi perlu mengakui bahwa masyarakat membawa rezim pengetahuan dan otoritas yang membentuk cara kawasan itu sendiri dimaknai. Konservasi di TNBTS, dengan demikian, bukan hanya soal menjaga alam sebagai objek ekologis, melainkan menjaga kemungkinan hidupnya suatu dunia sosial-kosmologis di tengah tekanan modernitas, negara, dan pasar wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, H. R., Savitri, A. R., & Hardhany, A. P. (2019). Illegal Hunting Prevention by Indigenous People in Bromo Tengger Semeru National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 391(1), 012067. <https://doi.org/10.26555/novelty.v10i1.a13561>
-
- Ade, F. Y., Hakim, L., & Arumingtyas, E. L. (2019). Habitat *Anaphalis spp.* in Tourism Area in Bromo Tengger Semeru National Park, East Java. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 7(3), 147–154. <https://doi.org/10.21776/ub.jpdl.2019.010.02.09>
- Batoro, J., Indriyani, S., & Yanuwidi, B. (2017). Ethno-ecology of Komplangan Field of the Bromo, Tengger, and Semeru Area in East

- Java: A Qualitative Approach. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*. [10.15294/biosaintifika.v9i1.9193](https://doi.org/10.15294/biosaintifika.v9i1.9193)
- Becker, C. D., & Ghimire, K. (2003). Synergy Between Traditional Ecological Knowledge and Conservation Science Supports Forest Preservation in Ecuador. *Conservation Ecology*. [10.5751/ES-00582-080101](https://doi.org/10.5751/ES-00582-080101)
- Biermann, F., Pattberg, P., van Asselt, H., & Zelli, F. (2009). The fragmentation of global governance architectures: A framework for analysis. *Global Environmental Politics*, 9(4), 14–40. <https://doi.org/10.1162/glep.2009.9.4.14>
- Cinner, J., & Aswani, S. (2007). Integrating customary management into marine conservation. *Biological Conservation*, 140(1–2), 201–216. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2007.08.008>
- Colding, J., & Folke, C. (2001). Social Taboos: “Invisible” Systems of Local Resource Management and Biological Conservation. *Ecological Applications*. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2001\)011\[0584:STISOL\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2001)011[0584:STISOL]2.0.CO;2)
- Dawson, N. M., Coolsaet, B., Bhardwaj, A., Brown, D., Lliso, B., Loos, J., Mannocci, L., Martin, A., Oliva, M., Pascual, U., Sherpa, P., & Worsdell, T. (2024). Reviewing the science on 50 years of conservation: Knowledge production biases and lessons for practice. *Ambio*, 53(10), 1395–1413 <https://doi.org/10.1007/s13280-024-02049-w>
- Elmhirst, R., Siscawati, M., & Basnett, B. S. (2015). Inhabiting the forest: Perspectives from feminist political ecology. *The Journal of Peasant Studies*. https://www.researchgate.net/publication/283026428_Feminist_political_ecology
- Folke, C. (2004). Traditional Knowledge in Social–Ecological Systems. *Ecology and Society*. <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss3/art7/>
- Geels, FW (2002). Transisi teknologi sebagai proses konfigurasi ulang evolusioner: Perspektif multi-level dan studi kasus. *Research Policy*, 31 (8-9), 1257–1274. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(02\)00062-8](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8)
- Hefner, R. W. (1985). *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691101200>
- Hernawan, H., Abdussalam, R., Taofik, D. B. I., & Susila, A. A. R. (2020). Analysis of type insect in Javanese edelweiss (*Anaphalis javanica*) at Tegal Bungbrun Papandayan Mountain. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098, 062063. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1098/6/062063>
- Hidayat, S. S. (2019). Kedudukan, peran, dan fungsi Dukun Pandita di Suku Tengger. *Umbara*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.24198/umbara.v4i1.20543>
- IPBES. (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822389781>
- Naughton-Treves, L., Holland, M. B., & Brandon, K. (2005). The role of protected areas in conserving biodiversity and sustaining local livelihoods. *Annual Review of Environment and Resources*, 30(1), 219–252. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.0504.164507>
- Oldekop, J. A., Holmes, G., Harris, W. E., & Evans, K. L. (2015). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas. *Conservation Biology*, 30(1), 133–141. <https://doi.org/10.1111/cobi.12568>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Putri, F. K., Noven, H. J., Nurcahyati, M., Irfan, A. N., Septiasari, A., Batoro, J., & Setyawan, A. D. (2022). *Review: Local wisdom of the Tengger Tribe, East Java, Indonesia in environmental conservation*. *Asian Journal of Ethnobiology*, 5, 20–34. <https://doi.org/10.13057/asianjethnobiol/y050103>

Muhammad Gilang Firdaus¹, A. Zahid², Peran Kepercayaan Lokal dalam Mendukung Konservasi Edelweis dan Pengelolaan Kawasan Lindung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Indonesia

- Sukmawan, S., & Alifah, N. (2024). Harmonisasi manusia dengan alam dan ekologi: Kajian atas budaya Tamping di masyarakat Tengger. *Jurnal Kawistara*, 4(2), 186–197. <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/89093>
- Souther, S., McGill, B. J., & Gallant, D. (2023). Traditional ecological knowledge in monitoring biodiversity change: A framework for integration. *Ecology and Society*, 28(1), 15. <https://doi.org/10.5751/ES-13910-280115>
- Susanto, D., Nugroho, P., & Numata, S. (2024). Traditional ecological knowledge for monitoring *Anaphalis javanica* (DC.) Sch.Bip. (Asteraceae) in Bromo Tengger Semeru National Park, Indonesia. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196, 717. <https://doi.org/10.1007/s10661-024-12869-8>
- Techera, E. J. (2010). Customary law and community-based fisheries management across the South Pacific region. *Law, Environment and Development Journal*, 6(1), 1–21. https://www.fao.org/fileadmin/templates/legal/docs/Creating_Legal_Space_for_Fisheries.pdf
- Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: The multiple evidence base approach. *Ambio*, 43(5), 579–591. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0501-3>
- Verschuuren, B., Wild, R., McNeely, J., & Oviedo, G. (Eds.). (2010). *Sacred Natural Sites: Conserving Nature and Culture*. Earthscan/IUCN. <https://www.iucn.org/resources/publication/sacred-natural-sites>
- Wahyudi, D. (2011). Distribusi dan kerapatan edelweis (*Anaphalis javanica*) di Gunung Batok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *El-Hayah: Jurnal Biologi*, 1(2). <https://doi.org/10.18860/elha.v1i2.1694>
- Wibowo, J. M., Muljaningsih, S., & Satria, D. (2021). Daya saing ekowisata berkelanjutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 91–107. <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp>
- Wiswayana, I. N. S., Suparsa, I. G. P., & Ardiasa, I. K. (2024). Kosmologi dataran tinggi vulkanik sebagai arsitektur tata kelola konservasi. *Jurnal Kajian Bali*, 14(1). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>
- Yunas, N. S., Susanto, H., Mukari, & Wahyuningsih, E. (2023). Integrasi ekologi dan budaya dalam inovasi pemerintah desa di kawasan Bromo-Tengger-Semeru. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(5). <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i5>
- Yunas, N. S., Susanto, H., Mukari, Wahyuningsih, E., & Nafisah, K. (2024). Integration of ecology and culture in encouraging village government innovation in the Bromo-Tengger-Semeru area. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 13(1), 402–409. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i1.3148>